

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK MUHAMMAD DI MADINAH

Ayu Usada Rengkaningtias

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
usadaayu@gmail.com

ABSTRACT

The influence of the Prophet Muhammad as the bearer of the Islamic message is known plural. It is also about his prophetic and apostolic. The thing that is rarely discussed is Muhammad's position as a political communicator. In this case Muhammad is certainly an actor in the process of political communication in Medina. History calls the long journey of forming the Medina State under the reign of Muhammad starting from zero to become an area that was calculated at that time. It is not excessive for Muhammad to be called as a political actor in the establishment of Medina as well as political communicator in the government of Medina.

In political communication, it is mentioned that political actors can form a public opinion, which then becomes consensus and mutually agreed. Thus, Muhammad has fulfilled that element in his leadership over Medina. In the process of political communication, there are important elements such as political communicators, messages delivered, and targets to the political communication effect that made Muhammad in Medina. The interesting thing for studied is Muhammad's political communication strategy. Where is as a political communicator, Muhammad was able to unite the heterogeneity and pluralism of the community who then agreed and want to be under his leadership in Medina.

This paper is a literature study with an analytical descriptive approach as a way of describing and explaining historical facts relating to the role of Muhammad as a political communicator. From the results of the research, it was found that Muhammad had a brilliant political communication strategy. These strategies are: 1) The credibility of political communicators; 2) Create culture together and the elimination of racism as a political message; 3) Medina Charter as a target of political communication; 4) The practice of negotiation in political communication; 5) Selection of appropriate media in political communication. The entire political communication strategy of Muhammad can be seen from the elements of political communication. The author mentions that the Prophet Muhammad as the leader of Medina at that time has a communication strategy that goes far beyond the existing contemporary theory.

Keyword: communication strategy, political communication, Prophet Muhammad, Medina

ABSTRAK

Pengaruh Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah Islam sudah diketahui secara jamak. Begitu pula kenabian dan kerasulannya. Hal yang jarang diperbincangkan adalah posisi Muhammad sebagai komunikator politik. Dalam hal ini tentunya Muhammad sebagai aktor dalam proses komunikasi politik di Madinah. Sejarah menyebut perjalanan panjang membentuk Negara Madinah dibawah pemerintahan Muhammad

dimulai dari nol hingga menjadi sebuah wilayah yang diperhitungkan kala itu. Tidak berlebihan jika Muhammad disebut sebagai aktor politik dalam pendirian Madinah sekaligus komunikator politik dalam pemerintahan Madinah.

Dalam komunikasi politik, disebutkan bahwa aktor politik dapat membentuk opini publik, yang kemudian menjadi konsensus dan disetujui bersama. Maka, Muhammad telah memenuhi unsur tersebut dalam kepemimpinannya atas Madinah. Dalam proses komunikasi politik, terdapat unsur penting diantaranya komunikator politik, pesan yang disampaikan, target hingga efek komunikasi politik yang dibuat Muhammad di Madinah. Hal yang menarik dikaji adalah strategi komunikasi politik Muhammad. Dimana sebagai komunikator politik, Muhammad mampu menyatukan heterogenitas dan kemajemukan masyarakat yang kemudian sepakat dan mau berada dibawah kepemimpinannya di Madinah.

Tulisan ini adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif analitis sebagai cara untuk menjabarkan dan menjelaskan fakta-fakta sejarah berkaitan dengan peran Muhammad sebagai komunikator politik. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa Muhammad memiliki strategi komunikasi politik yang cemerlang. Strategi-strategi tersebut diantaranya adalah 1). Kredibilitas komunikator politik; 2). Pembuatan budaya bersama dan penghapusan rasisme sebagai pesan politik; 3). Piagam Madinah sebagai target komunikasi politik; 4). Praktik negosiasi dalam komunikasi politik; 5). Pemilihan media yang tepat dalam komunikasi politik. Keseluruhan strategi komunikasi politik Muhammad tersebut dapat dilihat dari unsur-unsur komunikasi politik. Penulis menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sebagai pemimpin Madinah kala itu, memiliki strategi komunikasi yang jauh melampaui teori kekinian yang ada.

Kata kunci : strategi komunikasi, komunikasi politik, Nabi Muhammad, Madinah

PENDAHULUAN

Selain sebagai utusan Allah SWT dan pembawa risalah Islam, Nabi Muhammad merupakan seorang pemimpin yang revolusioner di zamannya. Pendirian Madinah adalah salah satu buktinya. Di bawah kepemimpinan Muhammad, Yastrib berubah total. Dari semula yang hanya kota kecil di Jazirah Arab, berubah menjadi wilayah yang diperhitungkan. Perubahan pada kota yang pada perkembangannya disebut Madinah itu terjadi hanya dalam kurun waktu 10 tahun. Proses tersebut cukup singkat

bila dilihat dari kemajuan tatanan sistem sosial dan politik sebuah negara.

Muhammad juga dikenal sebagai pembaharu tatanan sosial masyarakat. Agama baru yang ditawarkan bukan hanya mengurus urusan spiritual namun juga perkara duniawi dan kemasyarakatan. John L. Esposito menyebutkan keutamaan Muhammad sebagai pembaharu di bidang agama dan sosial. Muhammad adalah negarawan yang membangun sebuah peradaban baru dengan cara menciptakan tatanan sosial politik di masyarakat. Muhammad adalah pembaharu yang membangkitkan

peradaban besar di dunia (Esposito, 2001:83).

Menurut Michael H. Hart, Muhammad adalah satu-satunya manusia dalam sejarah yang berhasil meraih sukses luar biasa. Muhammad ditempatkan di urutan pertama dari 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Muhammad disebut sebagai pemimpin yang tangguh, tulen dan efektif. Hart menilai, keberhasilan Muhammad bukan hanya dalam tataran agama semata, tapi juga ukuran duniawi. Dia menambahkan, diukur dari sudut pandang agama semata, pengaruh Muhammad setara dengan pengaruh Isa dalam sejarah kemanusiaan. Muhammad melakukan kombinasi antara agama dan dunia dengan sangat baik. Muhammad, menurut Hart adalah seorang manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia (Hart, 1988: 27-34). Ukuran penempatan nomor satu bagi Muhammad berdasarkan pengaruh tokoh pada dunia (Hart, 1988: 17-18).

Muhammad dikatakan sebagai pemimpin dan tokoh paling berpengaruh sepanjang masa, bukan tanpa alasan. Dalam sistem pemerintahan Madinah, Muhammad tidak hanya memimpin kaum muslim Arab saja. Namun, Muhammad memimpin atas heterogenitas

masyarakat Arab. Padahal, Muhammad datang membawa agama dan aturan bukan di tengah masyarakat yang tidak memiliki agama maupun aturan. Muhammad datang saat masyarakat justru sudah memegang erat ajaran agama, suku dan kelompok masing-masing.

Mulanya Muhammad dan pengikutnya hanyalah orang-orang yang terusir dari tanah kelahirannya (Makkah) lalu hijrah ke Yatsrib. Dalam kondisi itu, terdapat perbedaan mendasar antara kelompok pendatang dan penduduk asli Madinah. Menyiasatinya, Muhammad menciptakan ikatan persaudaraan antara keduanya. Kelompok pendatang disebut golongan Muhajirin (orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah). Sementara penduduk asli Madinah disebut Anshar (penolong Muhajirin).

Permasalahan lain di Madinah yang bahkan telah ada sejak sebelum Muhammad datang adalah rentannya terjadi konflik dalam masyarakat. Pertentangan dan pertikaian antar suku kerap terjadi. Masyarakat Yatsrib terdiri dari berbagai golongan antara lain Suku Aus dan Khazraj, golongan Arab nonmuslim serta kaum Yahudi. Muhammad sanggup mengatasi masalah tersebut. Dia berhasil

menyatukan heterogenitas yang ada di Madinah dibawah kepemimpinannya.

Madinah menjadi bukti bahwa Muhammad adalah negarawan ulung yang menciptakan tatanan baru dalam aspek sosial politik bagi masyarakat. Hal demikian tentu tidak terlepas dari strategi komunikasi, khususnya di bidang politik kenegaraan. Pertanyaannya, bagaimana cara Muhammad berkomunikasi sehingga mampu menguasai bahkan bisa menjadi pemimpin bagi semua kalangan? Jika Muhammad tidak memiliki strategi komunikasi yang handal dalam berpolitik, maka bisa jadi negara Madinah tidak akan pernah terbentuk. Tanpa strategi komunikasi politik, maka mustahil Madinah menjadi wilayah yang diperhitungkan kala itu.

KERANGKA PEMIKIRAN

Harold Laswell, seorang ilmuwan politik, pada 1948 mengemukakan bahwa cara yang mudah untuk melukiskan suatu tindakan komunikasi adalah menjawab pertanyaan mengenai siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa dan dengan akibat apa (Dan Nimmo, 1989:13). Secara sederhana, Laswell mengungkapkan kesekian unsur tersebut dalam proses komunikasi. Selanjutnya, penjabaran mengenai

komunikasi politik dapat dikaitkan dengan politik itu sendiri. Dimana, dalam proses komunikasi politik sudah tentu melibatkan aktor politik yang berperan sebagai komunikator (siapa) yang memberikan pesan dalam bidang politik. Lalu, isi pesan atau apa yang disampaikan (apa), menggunakan cara atau media apa dalam menyampaikan pesan politik itu (saluran apa) dan seterusnya. Maka, dari unsur-unsur inilah dalam analisis akan dijelaskan siapakah Muhammad, menyampaikan pesan apa, menggunakan cara apa dan bagaimana caranya menyampaikan pesan politik.

Secara terminologi, komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Definisi politik dilihat dari terminologinya merupakan aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan, bermaksud memengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat. Maka, komunikasi politik dalam kajian politik, dapat dipahami sebagai upaya-upaya pembentukan kesepakatan. Komunikasi politik sebagai kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor

politik kepada pihak lain (Heryanto, 2013:2-3).

Anwar Arifin mengartikan, komunikasi politik sebagai pembicaraan dan tindakan untuk memengaruhi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan pandangan tersebut, jelas bahwa komunikasi politik berperan dalam suatu sistem politik, terutama untuk memperlancar fungsi sistem politik (Arifin, 2015:65-66). Berbicara tentang konteks komunikasi politik, Nabi Muhammad merupakan aktor sekaligus komunikator politik dalam suatu wilayah di bawah kepemimpinannya.

Nurani Soyomukti menyebut, komunikasi merupakan proses menghubungkan pesan-pesan dan informasi agar terjadi pengertian. Ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari usaha penyampaian pesan antarmanusia. Sementara politik secara garis besar berkenaan dengan gejala kekuasaan, kewenangan pengaturan, ketaatan dan ketertiban. Politik berkaitan dengan tiga hal utama, yakni kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*) dan ketaatan atau ketertiban (*order*). Komunikasi politik adalah gejala yang membuat kepentingan-kepentingan politik dapat disalurkan melalui media dan tindakan yang lebih

tepat dan efektif (Soyomukti, 2013:23). Begitu pula Muhammad selaku kepala negara yang memiliki *power*, *authority* dan *order* melalui media komunikasi politik.

Sementara itu, Henry Subiakto mengartikan komunikasi politik sebagai komunikasi persuasi, yakni usaha manusia untuk memengaruhi orang lain agar sesuai dengan kehendaknya. Untuk itulah, komunikasi politik tidak akan lepas dari pembahasan mengenai komunikasi massa, opini publik, retorika gerakan dan sistem politik lainnya (Subiakto, 2012:7). Hafied Cangara mengartikan komunikasi politik sebagai bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Dalam komunikasi politik, terdapat unsur – unsur penting. Diantaranya adalah komunikator politik, pesan politik, media politik, sasaran/ target politik dan efek komunikasi politik (Cangara, 2011: 29-32).

Berdasarkan landasan teori inilah, Muhammad sebagai komunikator politik tentu dapat diketahui apa pesan politik yang disampaikannya, melalui media apa, memiliki sasaran/ target apa dan menimbulkan efek apa dalam politik Madinah kala itu. Melalui

landasan-landasan teori diatas, penelitian ini bertujuan untuk melihat strategi komunikasi politik dalam proses komunikasi politik yang dilakukan oleh Muhammad di Madinah.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini berupaya menjelaskan bagaimana Muhammad melakukan strategi komunikasi dalam posisinya sebagai pemimpin agama sekaligus negara. Strategi komunikasi politik inilah yang memungkinkan dapat diteladani dari Muhammad. Menjadi kajian yang sangat menarik untuk dikaji, ketika Nabi Muhammad, selain membawa risalah agama, berpedan sekaligus sebagai komunikator politik. Muhammad adalah aktor politik utama di Madinah kala itu. Bahkan, Muhammad dapat dikatakan sebagai pelopor berdirinya negara Madinah.

Bertumpu pada data–data kepustakaan, penulis hendak menganalisis bagaimana seorang Muhammad mengemban peran sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin negara dari aspek komunikasinya. Maka, penelitian ini berusaha mengupas tuntas dan menganalisis strategi komunikasi politik Muhammad dengan menggunakan studi pustaka. Penjabaran hasil penelitian dan pembahasan akan

menggunakan metode analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Muhammad di Bidang Politik di Madinah

Meskipun menjadi tempat lahirnya Islam, ternyata Makkah tidak sepenuhnya menjadi lokasi yang tepat bagi Muhammad untuk membangun tatanan politik dan pemerintahan. Sebelum hijrah ke Madinah, Muhammad hanya mendapatkan sedikit pengikut di Makkah. Mayoritas penduduk Makkah menolak dan memusuhi ajaran yang dibawa Muhammad. Pemboikotan terhadap Bani Hasyim ini adalah salah satu bentuk penentangan Quraisy terhadap dakwah Muhammad. Tiga tahun lamanya pemboikotan itu berlangsung (Syalabi, 1992:95). Kafir Quraisy melarang siapapun menolong, melakukan barter dan berdagang/berniaga dalam bentuk apapun dengan Bani Hasyim. Bani Hasyim menderita kesengsaraan, kelaparan dan kemiskinan karena pemboikotan tersebut. Penolakan dan pemboikotan itu menunjukkan bahwa Muhammad belum memiliki tampuk kekuasaan, khususnya di bidang politik.

Muhammad belum memperoleh loyalitas formal sebagai pemimpin

negara di Makkah. Harun Nasution berpendapat, di Makkah Muhammad hanya berfungsi sebagai kepala agama dan tanpa mempunyai fungsi kepala pemerintahan karena kekuasaan politik belum dapat dijatuhkan pada waktu itu. Pada periode ini Muhammad belum dapat membangun struktur maupun tatanan politik di masyarakat, apalagi pemerintahan. Hal berbeda dialami Muhammad di Madinah, pasca peristiwa hijrah. Muhammad mendapatkan otoritas sebagai pemimpin politik. Dalam periode ini, Muhammad bukan hanya mendapatkan peran sebagai pembawa agama Islam, namun juga sebagai pemimpin negara. Landasan pertama Muhammad diakui sebagai pemimpin politik bermula dari peristiwa Bai'at al-Aqabah (Sutriani, 2016:151).

Dalam referensi lain disebutkan, peristiwa Bai'at Aqabah tersebut merupakan tanda diakuinya legislasi kepemimpinan Muhammad sebagai pemimpin mereka. Sebab, terjadi persekutuan antara Nabi dan penduduk Yatsrib hingga legitimasi formalnya sebagai kepala negara di Madinah. Selanjutnya, legitimasi Muhammad di bidang politik juga didukung dengan ditetapkannya Piagam Madinah. Melalui Piagam Madinah itulah kehidupan masyarakat Madinah diatur.

Mereka menjalankan aturan-aturan yang mereka sepakati bersama (Fu'adi, 2011:13). Di Madinah, Muhammad mendapat legalitas formal sebagai pemimpin agama sekaligus kepala negara di Madinah. Belum dua tahun dari kedatangan Nabi Muhammad di kota itu, dideklarasikan sebuah perjanjian yang mengatur suatu hubungan antar komunitas yang merupakan komponen masyarakat yang majemuk di Madinah yang disebut Piagam Madinah. Banyak diantara pakar ilmu politik Islam mengatakan Piagam Madinah sebagai kontribusi negara Islam pertama yang dicanangkan Nabi di Madinah (Fu'adi, 2013:152).

Menurut Budiardjo dalam Anwar Arifin, sesuai dengan teori politik tujuan akhir negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum*), *common good (the good of community)*, *common wealth* (Arifin, 2015: 38). Disinilah peran Muhammad bukan hanya menjadi pemimpin agama tetapi sekaligus sebagai kepala negara. Muhammad berperan sentral dalam mensejahterakan rakyatnya.

Muhammad mengamati kondisi masyarakat Yatsrib sebelum dia hijrah. Muhammad memandang bahwa pembangunan masjid adalah langkah strategis, sebab kaum Arab biasanya

memiliki tempat berkumpul untuk berbagai kegiatan mulai dari jual beli, perkawinan dan acara lainnya. Untuk itulah, Muhammad menjadikan masjid sebagai salah satu langkah politiknya. Pada awal abad pertama Islam, selain sebagai tempat ibadah, masjid berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Masjid juga difungsikan sebagai sarana mempersatukan suku-suku di Madinah. Masjid juga sebagai tempat membangun semangat, kekuatan moral dan spiritual masyarakat Madinah. Dalam hal ini Muhammad meletakkan konsep musyawarah yang berdasarkan QS Ali Imran ayat 159 dan As-Syura ayat 38 (Gulen, 2002:279).

Muhammad juga disebut sebagai pemimpin yang universal. Dia memiliki beberapa kriteria yang ditunjukkan dari beberapa langkah politisnya sebagai pemimpin. Tindakan tersebut antara lain senantiasa menunjuk orang yang kompeten untuk menangani suatu urusan, mengenal umatnya dengan baik, menyatukan kelompok yang berbeda (Ansar dan Muhajirin) serta senantiasa mengutamakan musyawarah sebelum mengambil sebuah keputusan penting dengan para sahabatnya (Gulen: 2002:273-288). Konsep musyawarah dan penetapan Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar negara menjadi kebijaksanaan politik Muhammad.

Menurut Muhammad, tidak ada pemimpin yang tidak membutuhkan musyawarah. Bahkan Muhammad saja masih diperintahkan Allah SWT untuk bermusyawarah. Dan diriwayatkan dari Abi Hurairah R.A dia berkata bahwa tidak ada seseorang yang banyak musyawarah dengan para sahabatnya daripada Rasulullah SAW (Taymiyyah, 1997: 155).

Strategi Komunikasi Politik Muhammad di Madinah

Dalam sejarah Islam dijelaskan bahwa sejatinya, terlepas ada atau tidak adanya perintah untuk menjadi kepala negara secara empirik, Muhammad telah menjadi seorang kepala negara di Madinah. Jika syarat berdirinya negara adalah wilayah, penduduk serta pemerintahan yang berdaulat, maka semua unsur negara telah terpenuhi. Muhammad memimpin dalam kemajemukan masyarakat Madinah sesuai dengan konsep Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Untuk merealisasikan misi tersebut, perlu kekuatan politik yang memadai. Muhammad pun memiliki strategi komunikasi dan langkah politik yang tepat sebagai pemimpin bangsa dan kepala negara.

Menurut M. Zuhri, dalam mewujudkannya Muhammad

menempuh berbagai macam cara, misalnya mengatur hubungan berbagai komunitas dengan menerbitkan Piagam Madinah, membuat peraturan tentang pajak dan larangan riba bagi masyarakat luas demi pembangunan ekonomi serta meningkatkan hubungan bilateral negara dalam bentuk kunjungan kenegaraan dan pengiriman utusan/delegasi. Muhammad pun memiliki berbagai strategi komunikasi politik selama memimpin Madinah kala itu, yang dapat disebut telah melampaui strategi komunikasi politik masa kini.

a. Kredibilitas Komunikator Politik Sebagai Strategi Muhammad

Komunikator politik, merupakan orang atau lembaga yang berkepentingan menyampaikan pesan politik pada pihak lain, baik bersifat formal maupun informal dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama (*mutual understanding*) dengan khalayak yang menjadi sasaran penyampaian pesan (Heryanto, 2013:7). Komunikator politik juga salah satu unsur penting dalam komunikasi politik. Daya tarik (*source attractiveness*) dan kredibilitas (*source credibility*) dapat meningkatkan perubahan sikap, pendapat dan tindakan komunikan. Tanpa kredibilitas dari aktor komunikasi politik, maka proses

komunikasi yang berlangsung tidak efektif. Kredibilitas dibutuhkan untuk meningkatkan keyakinan komunikan dalam sebuah proses komunikasi politik (Soelhi, 2009 :63-64).

Menurut Shoelhi (2009), dipandang dari dimensi komunikator, komunikator yang efektif adalah komunikator yang memiliki kredibilitas (*source credibility*) dan daya tarik (*source attractiveness*). Kredibilitas ditentukan oleh derajat keahlian, pengalaman, keterampilan, kejujuran dan jabatan. Kredibilitas dapat meningkatkan perubahan sikap, pendapat dan tindakan komunikan. Daya tarik ditentukan oleh derajat kemampuan untuk memberikan keyakinan secara selaras dengan rasio dan jalan pikiran komunikan. Daya tarik dapat memotivasi komunikan memperhatikan dan mengikuti apa yang dikatakan komunikator dalam upaya pembentukan opini dan perubahan perilaku.

Dalam komunikasi politik, setidaknya harus ada beberapa prinsip komunikasi yang penting diperhatikan demi mencapai tujuan politik. Hal tersebut antara lain komunikator, komunikan, pesan dan media. Komunikator politik juga setidaknya harus memiliki tiga kemampuan (karakter) untuk dapat mempengaruhi,

yaitu *good sense, good moral character* dan *good will* (Liliweri, 2010:61). Muhammad memiliki tiga kemampuan yang merepresentasikan kredibilitas seseorang. Karakter Muhammad adalah salah satu strategi mendasar yang dimiliki Muhammad dalam proses komunikasi politik.

Kredibilitas dan ketokohan tersebut bahkan telah ada sejak Muhammad belum mendapatkan risalah kenabian. Proses pembentukan kredibilitas inipun sudah dimulai sejak kanak-kanak. Dimana putera pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab yang lahir pada 12 Rabiul Awwal, 20 Agustus 570 Masehi di Makkah ini telah diakui kredibilitasnya oleh masyarakat. Di usia yang masih muda, dalam dunia perniagaan yang ia jalani bersama sang paman, Abu Thalib, Muhammad mendapat label sebagai pedagang yang cakap dan jujur. Bahkan seluruh bangsa Quraisy menjulukinya *Sidiq* (benar) dan *amin* (dapat dipercaya).

Kredibilitas sebagai pemimpin telah diketahui potensinya saat Muhammad, yang saat itu belum diangkat menjadi Nabi, mampu meleraikan pertengkaran suku – suku Quraisy. Mereka bertengkar dan berdebat tentang siapa yang berhak mengembalikan Hajar Aswad di tempat semula saat

perbaikan Ka'bah. Masing – masing suku mengklaim paling pantas meletakkan batu hitam tersebut di tempat semula. Muhammad, menggunakan pemikiran yang cerdas, meletakkan mantelnya diatas tanah, meletakkan batu hitam diatasnya, lalu mengundang kepala – kepala suku yang dipercayai memperbaiki Ka'bah untuk mengangkat ujung mantel tersebut. Saat telah sampai di tempat Hajar Aswad tersebut, Muhammad pun mengambilnya dan meletakkannya di posisi semula (Gulen, 2002:277).

Peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad inilah yang menjadi tolak ukur masyarakat terhadap Muhammad, atas kemampuannya memimpin. Muhammad yang kala itu masih muda, telah menunjukkan kepiawaiannya menyelesaikan konflik kepentingan. Muhammad cerdas, akomodatif dan bisa disebut memiliki *power sharing*. Saling klaim atas suku satu dengan yang lainnya saat itu bisa saja menimbulkan perpecahan antar Quraisy tanpa tindakan Muhammad. Disanalah, diketahui bahwa sesungguhnya, Muhammad telah memiliki kesiapan untuk berkiprah di dunia politik. Inilah yang dalam ilmu komunikasi politik kekinian dikatakan sebagai *power sharing*, dengan mengutamakan

kerukunan dan perdamaian (Zuhri, 2004:27).

Saat itu, peristiwa pengembalian Hajar Aswad usai Ka'bah diterjang banjir itu, Muhammad berumur 35 tahun. Abu Umayyah bin Al Mughirah, seorang *sesepuh* yang disegani di kalangan Quraisy berkata siapa yang memasuki pintu Ka'bah pertama kali saat itu, orang tersebut berhak mengembalikan batu hitam di tempat semula. Semua suku pun menyepakatinya, ternyata orang tersebut adalah Muhammad. Namun, dia tidak lantas melakukannya sendirian. Ia justru meletakkan Hajar Aswad diatas bentangan surban dan mengajak para pemuka – pemuka suku mengangkatnya secara bersama – sama.

Sejarah mencatat, Muhammad merupakan pemimpin yang memiliki beragam kualitas kepemimpinan sebagai pendukung kredibilitasnya. Muhammad memiliki karakter yang kuat dan akhlaq yang terpuji sepanjang hidupnya. Muhammad juga memiliki kualitas pemimpin yang mendapatkan kepercayaan rakyat karena patut dan pantas dipatuhi. Muhammad memiliki beragam kualitas pemimpin yang akhirnya membuat rakyatnya patuh. Para pemimpin harus tegas tetapi fleksibel saat melaksanakan keputusannya dan tahu kapan harus maju terus dan keras atau kapan harus lunak dan ramah. Mereka harus tahu kapan harus sungguh – sungguh dan mantap, kapan harus sederhana dan harus selalu jujur, benar, amanah dan adil. Muhammad juga memiliki kualitas terpuji yakni tanpa ambisi duniawi

semata dan menyalahgunakan kekuasaan (Gulen, 2002:291).

Bukan hanya sejarawan Islam yang menyatakan kredibilitas Muhammad sebagai pemimpin. Gaya hidup sederhana sebagai seorang pribadi agung ini juga diakui oleh para sarjana Barat. Kebesaran Muhammad justru bukan pada kekuasaannya namun terletak pada kesederhanaan dan kemuliaan moral. Kredibilitas inilah yang sejatinya membuat masyarakat “terkuasai” oleh aktor politik, yakni Muhammad. Sebagaimana dalam buku yang ditulis Abdul Wahid Khan, tentang Rasulullah di mata para sarjana barat. Sikap dan gaya hidup Muhammad sebagai seorang pemimpin negara sangat unik dan tidak pernah ada yang menyamainya dalam sejarah dunia (Wahid Khan, 2002: 66-68) :

Entah Nabi sebagai seorang gembala di padang pasir Arab, ataukah seorang pedagang di pasar Syiria, atau menyendiri di Gua Hira' atau seorang reformer pertama di Makkah, kemudian di Madinah, atau seorang penakluk kota Makkah, dalam semua fase kehidupannya, beliau tetap sama – setia kepada dirinya, orang – orang (masyarakat) dan Tuhannya. Kondisi eksternal yang berubah – ubah tidak merubah kepribadian Nabi. Beliau tetap sederhana, ramah dan memiliki integritas yang luar biasa. Di Madinah dimana ia menjadi pemimpin dari keyakinan baru – Islam, ia juga menjadi pemimpin negara Islam. Keduanya melebur

menjadi satu dalam dirinya. Namun tak ada istana, rumah – rumah besar, pilar – pilar tinggi ataupun penjagaan – penjagaan untuk memberikan kesan kebesaran kekuasaannya. Kebesaran Nabi terletak pada kesederhanaannya dan kemuliaannya terletak pada keramahannya. Ia bersikap *low profil*.

Dari berbagai fakta diatas, komunikasi yang dihasilkan dari seorang komunikator politik yang kredibel tidak akan jauh dari nilai luhur kredibilitasnya. Begitu pula Muhammad yang dikenal sebagai pribadi yang jujur. Maka, aktivitas komunikasi yang dilakukan pun sesuai dengan prinsip kejujuran dalam berbagai aspek kehidupan. Termasuk sosok Muhammad dalam proses komunikasi politik.

Gelar *sidiq* (benar) yang disandang Muhammad serta pengakuan masyarakat atas kredibilitasnya juga menentukan materi pesan yang disampaikan. Artinya, seluruh informasi yang berasal dari Muhammad adalah sebuah kebenaran. Al – Amin mengandung pengertian dapat dipercaya. Hal ini berarti seluruh rangkaian proses komunikasi Muhammad tentulah terpercaya. Berdasar kredibilitasnya pula, Muhammad mampu menghasilkan sebuah komunikasi sebagai seorang pemimpin/ pemerintah tanpa

menghadirkan kesombongan dengan kekuasaan yang dimiliki. Bahkan terbukti, Muhammad sangat dekat dengan orang miskin dan kaum lemah. Kepribadian, moral serta gaya hidupnya inilah yang menjadi modal utama Muhammad sebagai pemimpin sehingga memiliki kredibilitas yang sangat tinggi di mata masyarakat serta menimbulkan sebuah pesan dan komunikasi yang efektif pula dalam sistem pemerintahan.

Dalam teori Komunikasi Politik, peran komunikator politik sama sekali tidak boleh diabaikan. Hubungan antara komunikator politik dan khalayak adalah bagian integral dari sebuah sistem sosial dalam komunikasi politik. Komunikator politik disebut membawa sebuah opini yang kemudian dibawa menjadi opini publik. Teori ini disebut dengan teori pelopor mengenai opini publik cetusan Karl Popper. Artinya, seorang komunikator publik membuat gagasan yang mungkin saja gagasan tersebut semula ditolak, lalu dipertimbangkan dan akhirnya diterima (Dan Nimo, 1989:29). Demikian juga posisi Muhammad kala itu, Muhammad memerankan peran sosial yang utama. Peran sosial inilah yang menjadikan Muhammad sebagai komunikator kredibel yang tidak diragukan lagi.

Maka, bisa saja keadaan Muhammad selaku komunikator politik

akan berbeda, jika Muhammad tidak memiliki integritas dan kredibilitas sebagaimana dipaparkan diatas. Tanpa budi pekerti yang baik atau kredibilitas yang buruk. Kemungkinan, komunikasi politik yang berjalan pun tidak akan semulus komunikasi yang dilakukan Muhammad. Pemimpin tanpa kredibilitas tentu akan mendapatkan respon berbeda dari masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Muhammad merupakan aktor handal dalam komunikasi politik yang menjadikan kredibilitas sebagai strategi komunikasi.

b. Budaya Bersama dan Penghapusan Rasisme Sebagai Pesan Pemersatu dalam Komunikasi Politik

Persaudaraan Muhajirin dan Anshar adalah salah satu langkah strategis yang digunakan Muhammad sebagai strategi komunikasi politik. Dimana, budaya merupakan hal yang tidak akan dapat dipisahkan dari masyarakat dan sangat mempengaruhi perbendaharaan kata dalam sebuah proses komunikasi. Budaya dan komunikasi tidak akan pernah dapat dipisahkan (Mulyana, 2014:20). Seorang komunikator (*source*) harus mempertimbangkan budaya agar dapat menciptakan sebuah komunikasi yang efektif. Maka, Muhammad menggunakan budaya

bersama sebagai pesan pemersatu dalam komunikasi politik.

Muhammad mampu menganalisis pentingnya budaya bagi masyarakat Arab saat itu sebagai pendukung komunikasi politik, selain sebagai unsur identitas bagi masyarakat. Termasuk bagi Anshar dan Muhajirin saat itu. Perekatan budaya antara kaum Muhajirin dan Anshar merupakan strategi yang sangat cemerlang saat Muhammad berinisiatif menggunakan budaya bersama. Caranya, adalah dengan menciptakan komponen budaya bersama tersebut di masyarakat. Kesamaan dalam hal budaya tentu akan membuat komunikasi semakin efektif.

Strategi komunikasi tersebut tampak jelas dalam upaya politis Muhammad mempersatukan Muhajirin dan Anshar. Muhammad membaca, perbedaan kaum yang hijrah (Muhajirin) dan kaum yang lokasinya dihijrahi (Anshar) harus dipersatukan. Kedua kaum ini dipersatukan dalam budaya bersama, yakni *ikhwanul muslimin* (persaudaraan muslimin). Tidak dengan membanggakan budaya satu sisi saja. Namun membangun budaya dan peradaban secara bersama – sama dengan memegang erat persaudaraan di kalangan umat Islam.

Muhammad tidak menyinggung mengenai adanya budaya dominan,

misalnya Anshar yang lebih dominan, sebab telah menjadi penolong bagi Muhajirin. Sebaliknya, tidak juga mengkomunikasikan bahwa Muhajirin lebih unggul sebab rela meninggalkan harta bendanya demi hijrah ke jalan Islam. Artinya, Muhammad menilai bahwa budaya dominan tidak akan menyelesaikan permasalahan atau menyatukan seluruh umat Islam. Sebab, dimanapun budaya dominan kerap menimbulkan perselisihan antar kelompok, misalnya pemisahan diri hingga perpecahan. Sebagaimana yang disebutkan tentang seringkali timbulnya perpecahan disebabkan adanya budaya dominan (Priandono, 2016:53-54) :

Seperti disebutkan adanya perbedaan dalam agama Kristen Protestan dan Katholik Roma yang memiliki hari raya yang sama. Begitu pula perbedaan sub budaya Jawa yang terbagi dalam Banyumasan, Arek, Pesisiran dsb yang antarsub – budaya memiliki karakteristik bersama.

Muhammad pun menciptakan budaya bersama, yakni persaudaraan sesama muslim sebagai budaya bersama dalam upaya penyatuan Muhajirin dan Anshar. Persaudaraan tersebut demikian eratnyanya, sampai – sampai Muhajirin dan Anshar memiliki hubungan yang begitu mendalam. Misalnya saja, ada salah seorang dari suku Anshar yang rela

membagi harta, rumah hingga istri (Zuhri, 2004:35).

Persaudaraan keduanya pun sangat mendalam, tulus dan sangat kuat sehingga kaum Anshar rela berbagi apapun dengan Muhajirin. Hingga pada akhirnya, Muhajirin pun merasa tak enak dan merasa membebani/ hutang budi yang kemudian disiasati dengan cara kaum Muhajirin diijinkan menggarap ladang kaum Anshar dengan imbalan hingga mereka mampu membangun rumah sendiri. Kedua suku inipun memiliki budaya bersama yang demikian eratnyanya ibarat satu bangunan yang berdiri diatas persaudaraan bernama Islam.

Muhammad menyatukan mereka dengan ucapan, “Marilah kita semua menjadi saudara dalam kepercayaan”. Dari hal itu disebutkan bahwa persaudaraan atas nama Islam tersebut kemudian berlanjut menjadi persaudaraan yang saling menguntungkan. Akhirnya, persaudaraan tersebut pun murni dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya. Dimana Muhajirin adalah pedagang, sementara Anshar adalah petani. *Ukhuwah Islamiyah* tersebut pun akhirnya menjadi persaudaraan yang saling menguntungkan. Kedua belah pihak pun bekerja keras mengolah tanah

dan berdagang sehingga memperoleh kecukupan (Rahman, 2002:270).

Keberhasilan strategi komunikasi Muhammad berupa menyatukan Muhajirin dan Anshar ini juga terbukti dalam sebuah langkah politik yang dilakukan Muhammad. Persaudaraan yang terikat dalam Ukhuwah Islamiyah tersebut membuat siapapun terharu dengan upaya saling berbagi, saling membantu dan saling percaya meskipun dalam kondisi genting sekalipun. Misalnya saja, persaudaraan yang masih tetap kuat dan tulus meski dalam keadaan perang yang mencekam sekalipun (F.Hasan, 2012:102):

Abu Jahm Hudzaifah meriwayatkan, “Saat perang Yarmuk, saya mencari saudara sepupu yang ikut berperang. Saya membawakan satu kendi air untuknya. Setelah menemukan, saya akan memberinya minuman itu, tetapi ada rintihan seseorang yang tak jauh dari saudara sepupu saya. Dengan isyarat, saudara sepupu saya menyuruh agar air itu diberikan kepada orang tersebut yang nyaris meninggal. Ketika saya mendekatinya, tempat yang berdekatan dengannya, ada orang yang merintih kehausan meminta air yaitu Hisyam bin Abil ‘Ash. Saya mendatangi orang itu ternyata ia telah meninggal. Akhirnya saya bawa kembali air itu ke Hisyam R.A. namun Hisyam juga meninggal. Langsung saya bawa air itu ke sepupu saya, ternyata ia juga sudah meninggal.

Hal ini adalah bukti bahwa Muhammad mampu membaca keadaan masyarakatnya. Bahkan, melampaui teori kekinian yang ada tentang bagaimana dampak negatif dari adanya budaya dominan dalam sebuah masyarakat majemuk. Bahwa, budaya dominan bisa jadi boomerang yang akan menghancurkan persatuan Madinah kala itu. Maka, pesan politik berupa pembentukan budaya bersama (persatuan Islam) kala itu adalah strategi komunikasi politik Muhammad.

Satu hal lagi strategi komunikasi politik Muhammad yang terkandung dalam pesan-pesan politik Muhammad. Pesan tersebut berupa prinsip *equality* (kesetaraan) tanpa adanya diskriminasi dan rasisme. Melalui kebijakan politiknya, Muhammad mengandalkan pesan politik yang sangat kontroversial saat itu. Muhammad mengakhiri praktik rasisme demi persatuan masyarakat dibawah kepemimpinannya. Padahal, rasisme sudah menjadi persoalan sejak dulu. Bahkan, sampai saat ini diskriminasi dan rasisme senantiasa menjadi polemik.

Superioritas kulit putih terhadap kulit hitam misalnya dimana orang kulit hitam selalu dianggap warga kelas dua. Begitupun kondisi di Makkah saat Muhammad diangkat sebagai Rasul. Suku Quraisy menganggap diri mereka

(khususnya) dan bangsa Arab (umumnya) lebih unggul ketimbang orang lain. Saat itulah Muhammad datang, selaku aktor sekaligus komunikator politik membawa pesan yang mendobrak praktik rasisme (Gulen, 2002:279) :

Sementara itu, Muhammad datang dengan risalah kenabian, mendobrak segala praktik rasisme. Muhammad menyatakan bahwa tidak ada orang Arab yang lebih baik dari non Arab, tak ada pula orang kulit putih lebih unggul dari orang kulit hitam. Superioritas hanya didasarkan pada ketakwaan kepada Tuhan semata.

Muhammad berhasil menghapuskan rasisme dan diskriminasi atas dasar warna kulit. Misalnya Umar pernah berkata tentang Bilal, yang berkulit hitam : Bilal adalah tuan kita, dan dibebaskan oleh tuan kita Abu Bakar. Zayd bin Haritsa, seorang budak hitam yang dibebaskan Muhammad sempat diangkat sebagai anak angkat. Bahkan, Muhammad menikahnya dengan Zaynab binti Jahsi, seorang perempuan muslim dari keluarga bangsawan Arab. Zayd bahkan ditunjuk Muhammad sebagai pemimpin perang yang disana terdapat para sahabat terkemuka seperti Umar, Abu Bakar dan lain sebagainya (Gulen, 2002:289).

Inilah berbagai peristiwa yang menunjukkan bahwa Muhammad memiliki strategi politik sebagai ciri seorang pemimpin. Muhammad mampu menjadi peleraai, pengatur serta *problem solver* dalam setiap masalah yang terjadi di masyarakat. Tanpa strategi diatas, tentunya mustahil beragam suku di Madinah bisa bersatu dibawah kepemimpinannya. Kedua langkah inilah yang juga menjadi strategi komunikasi politik Muhammad sebagai pemimpin di Madinah. Maka, Muhammad selaku komunikator politik memiliki cara yang tepat dalam menyampaikan pesan-pesan untuk mencapai tujuan politiknya, khususnya selaku pemimpin di Madinah.

c. Piagam Madinah Sebagai Target Politik Muhammad untuk Mempersatukan Kemajemukan

Pembentukan Piagam Madinah dinilai sebagai awal langkah nyata Muhammad tampil menjadi pemimpin. Tidak hanya bagi para pengikut yang muslim seperti Muhajirin – Anshar, namun juga bagi seluruh suku – suku di Madinah. Bahkan, Piagam Madinah merupakan sebuah perjanjian Muhammad (muslim) yang bersinggungan secara langsung dengan orang nonmuslim serta kaum Yahudi.

Muhammad menciptakan sebuah konstitusi yang mengatur semua umat dalam naungan negara Madinah. Undang – undang sebagai langkah strategi politik Muhammad ini, kemudian dikenal dengan nama Piagam Madinah yang ditulis pada tahun 623 Masehi atau tahun ke 2 Hijriah (Murodi, 2013:129).

Ilmuwan Barat lebih kerap menyebut Piagam Madinah ini sebagai sebuah konstitusi. Artinya, Piagam Madinah disebut sebagai naskah politik yang dibentuk untuk diterapkan sebagai dasar sebuah negara. Piagam Madinah disebut sebagai naskah politik yang paling tua dalam sejarah peradaban manusia. Namun, kendati paling tua, Piagam Madinah diakui sebagai naskah konstitusi pertama yang paling lengkap. Bahkan, keseluruhan isi Piagam Madinah tersebut disebut telah memenuhi secara syarat yang dibutuhkan oleh suatu konstitusi. Misalnya, dalam Piagam Madinah diatur mengenai deklarasi hak manusia, undang – undang negara, perjanjian (sebab terdapat pasal pembahasan khusus dengan orang Yahudi) dan berbagai nilai lainnya (Abidin Ahmad, 1973:72-73):

Jikalau dipakai pandangan keseluruhan piagam itu, maka tidaklah ada suatu kualifikasi yang paling tepat untuknya

selain mengakuinya sebagai suatu konstitusi negara”. Suatu konstitusi negara yang dikatakan oleh Prof. H.A. Gibb., bukanlah suatu wahyu yang diturunkan Tuhan, tetapi dari hasil pemikiran tinggi dan inisiatif Muhammad.

Konstitusi Madinah bahkan diakui sebagai konstitusi pertama dalam sejarah, yang mendahului konstitusi lainnya. Misalnya konstitusi Amerika ada 1787 yang dipandang sebagai konstitusi yang pertama di dunia, yang dipelopori oleh Pernyataan Hak- hak Dasar (*Declaration of Right*) pada 5 Juli 1775. Ternyata, Piagam Madinah bahkan telah ada sejak tahun 623 M. Sementara itu, Piagam Madinah juga disoroti sebagai sebuah perjanjian sehingga menjadikan piagam tersebut sebagai bukti kesabaran dan toleransi Islam kepada pemeluk agama lain selain Islam.

Butir-butir Piagam Madinah itulah yang disepakati bersama menjadi sebuah konstitusi yang mendasari berdirinya negara Madinah. Oleh karena itu pulalah, sebagai kepala Negara di Madinah, beliau memiliki kaitan berupa intensifikasi pemantapan sosio ekonomi politik, seperti sistem *syura* dalam politik, persamaan derajat, zakat, larangan riba. Konstitusi inilah yang membuat Madinah menjadi wilayah yang diperhitungkan.

Piagam Madinah yang dipelopori Muhammad ini bahkan menjadi salah satu sumber utama Muhammad dalam karirnya sebagai kepala negara di Madinah. Piagam Madinah, juga disebutkan sebagai upaya untuk memperbaharui hubungan bilateral politik antar – negara. Salah satu sumber pertama dalam karir Muhammad selain yang tercantum dalam Al-Qur'an adalah Piagam Madinah. Piagam yang dalam bahasa Arab disebut “*al- Ahd bi Al – Madinah*” merupakan dokumen penting, sekaligus menjadi bukti autentik dalam sejarah peradaban Islam, khususnya dalam hal mengatur hubungan bilateral antarnegara, penduduk Madinah yang Muslim dengan komunitas agama lain di Madinah dan sekitarnya. Munawir Syadzali menyebutkan, satu hal yang penting dicatat bahwa Piagam Madinah yang oleh banyak kalangan disebut sebagai konstitusi negara Islam pertama tersebut sama sekali tidak menyebut negara agama. Inti dari piagam yang dipelopori Muhammad ini adalah bagaimana setiap anggota komunitas menunjukkan solidaritas terhadap orang kafir sekalipun dalam bentuk perdamaian (Sulaiman, 2014:194):

Dasar-dasar kenegaraan Madinah saat itu, menurut Munawir Syadzali, *Pertama*, umat Islam merupakan satu komunitas

(*ummah*), meskipun berasal dari suku beragam. *Kedua*, hubungan antarsesama anggota komunitas Islam dengan komunitas lain dibangun atas dasar prinsip – prinsip : a. Bertetangga baik; b. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama; c. Membela mereka yang dianiaya; d. Saling menasehati dan; e. Menghormati kebebasan beragama.

Piagam Madinah secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua bagian. Bagian pertama berisi perjanjian Muhammad dengan Yahudi dan kedua perjanjian Muhammad dengan Muhajirin dan Anshar. Namun, menurut Dr. Hasan Ibrahim Hasan dalam Zainal Abidin Ahmad, secara rinci ada empat golongan yang diatur dan disatukan dalam konstitusi ini, yakni Kaum Muhajirin, Kaum Anshar, Munafiqun yaitu penduduk Madinah yang belum memeluk Islam dan Yahudi.

Ada hal yang menarik yang patut dikaji dibalik pembentukan Piagam Madinah yang dipelopori Muhammad ini. Dimana, konstitusi/ kesepakatan ini dibuat bukan hanya untuk muslim semata. Jika konstitusi adalah dasar dari sebuah negara, maka warga negara adalah siapapun yang wajib mentaati konstitusi tersebut. Sejarah mencatat, bahwa Piagam Madinah merupakan sebuah konstitusi bagi seluruh warga Madinah, siapapun

itu. Aturan tersebut diperuntukkan bagi muslim Arab, muslim penduduk asli Madinah bahkan bagi kafir Arab dan kaum Yahudi. Artinya, kendati aturan dibuat oleh Muhammad, sebagai pemimpin Islam kala itu, warga negara Madinah tidaklah semuanya muslim (Abidin Ahmad, 1973: 92) :

Berbeda sekali dari apa yang dituduhkan terhadap negara Islam, bahwa warga negaranya hanyalah orang – orang Islam belaka, sedang orang – orang yang tidak beragama Islam dianggap sebagai musuh yang harus diperangi atau dimusnahkan. Maka keluarlah tuduhan bahwa Islam adalah agama kolot, fanatik dan agresif, yang bersifat permusuhan dan kebencian terhadap selainnya.

Usai ditandatangani naskah politik tersebut oleh Muhammad, maka terbongkarlah konsep perpecahan suku-suku dan ras menjadi satu, yakni sebagai warga negara Madinah. Dokumen dengan sebutan lain Mitsaq Madinah (Piagam Madinah) inilah perjanjian pertama Muslim dengan Yahudi sebagai dua komunitas yang terpisah dan independen tetapi dalam satu kesatuan, yakni warga Madinah. Dari Piagam Madinah, dapat disimpulkan bahwa Muhammad memiliki strategi komunikasi intrareligius. Dimana selain penggunaan retorika dan teknik yang tepat dari pemahaman dan tersampainya pesan

lebih lanjut Muhammad memahami psikologis orang – orang non muslim yang berada dibawah kepemimpinan. Ini pulalah strategi politis Muhammad untuk menyatukan warga Madinah dibawah kepemimpinannya.

Apalagi, isi dari Piagam Madinah menjelaskan secara rinci kewajiban saling membela dan saling melindungi antar penduduk di Madinah. Penduduk Madinah dididik untuk patuh pada aturan yang telah disepakati bersama, bukan tunduk pada kekuasaan perseorangan, namun diatur demi kemaslahatan semua pihak. Kendati demikian, seluruh kendali dan hakim akhir dari segala macam perselisihan yang terjadi di Madinah baik dari suku manapun diserahkan pada Muhammad selaku pemimpin Madinah. Perlindungan dari Muhammad selaku kepala negara di Madinah diperuntukkan bagi muslim dan non muslim. Hal inilah yang memungkinkan kemajemukan di Madinah dapat disatukan dibawah kepemimpinannya.

Kemampuan Muhammad dalam strategi komunikasi politik inilah yang akhirnya memudahkannya menyatukan seluruh heterogenitas di Madinah menjadi suatu bangsa (*nation*) yang berdaulat. Piagam ini menjadi bukti bahwa Muhammad memiliki target

dalam komunikasi politiknya, yakni mempersatukan seluruh kemajemukan warga Madinah dibawah kepemimpinannya.

d. Negosiasi Demi Mencapai Kesepahaman dalam Komunikasi Politik

Negosiasi ini selain berarti perundingan, persetujuan, kesepakatan juga berarti tawar menawar. Tujuan dari negosiasi adalah tercapainya kata-kata sepakat (*gentlemen agreement*) yang didalamnya terkandung kesamaan persepsi, saling pengertian dan persetujuan. Manfaatnya adalah tercapainya jalinan kerjasama antarinstitusi ataupun perorangan demi melakukan suatu kegiatan/ usaha bersama atas dasar saling pengertian (Heryanto, 2013:105).

Salah satu teori komunikasi, yakni Teori Interaktif (konvergensi) disebut lebih menyerupai proses negosiasi (Shoelhi, 2009:14). Dalam referensi lain, teori ini disebut dengan komunikasi Model Berlo. Menurut model komunikasi ini, sumber dan penerima pesan dipengaruhi oleh beragam faktor. Faktor tersebut antara lain keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial dan budaya. Model ini juga memiliki kelebihan berupa tidak terbatas pada komunikasi

publik/ komunikasi massa saja tapi juga komunikasi antarpribadi dan berbagai bentuk komunikasi tertulis serta bersifat heuristik (merangsang penelitian), sebab merinci unsur penting dalam proses komunikasi (Mulyana, 2005:162-163). Negosiasi merupakan proses komunikasi interaktif yang dilakukan demi mencapai kata sepakat dengan melalui proses tawar menawar.

Negosiasi merupakan suatu proses yang mengandung kesepakatan, sifatnya menghindari konflik fisik. Kendati bentuk negosiasinya masih sangat sederhana dan klasik, namun proporsi langkah politik Muhammad ini tetap dapat disebut sebagai negosiasi. Sistem negosiasi Muhammad salah satunya tercermin dalam salah satu bentuk upaya diplomasi Muhammad di bidang politik, yakni di Perjanjian Hudaibiyah. Sistem negosiasi Muhammad dengan juru runding Quraisy itu merupakan sistem baru dalam mengatasi konflik bilateral saat itu, pertama bagi masyarakat Arab dan sekitarnya, termasuk kerajaan Persia dan Romawi (Wahid, 1991: 10-11).

Dalam praktik negosiasi tersebut, Muhammad memiliki etos (daya tarik) yang berbentuk alam pikiran, akhlak dan segala hal yang dinilai baik oleh orang lain. Misalnya, pertama sikap Muhammad yang

pemaaf, yang dapat dijadikan senjata Muhammad untuk menetralkan hubungan, dengan siapapun termasuk musuh. Dalam hal ini adalah kafir Quraisy. Konsistensi Muhammad terkait bulan Ramadhan yang erat dengan tradisi keakraban tanpa pertumpahan darah serta niat Muhammad dan kaum muslim yang hanya ingin haji tanpa berperang saat ke Makkah ini juga menjadi nilai penting dalam negosiasi saat Perjanjian Hudaibiyah.

Tawar menawar kaum muslim pengikut Muhammad untuk dapat bisa mengunjungi Makkah di Ka'bah ini hanya untuk tawaf. Muhammad mampu menghasilkan praktik politik negosiasi sebelumnya dengan memahami emosi, kepentingan dan tujuan masing – masing pihak yang berselisih. Ini menunjukkan, Muhammad telah melakukan sebuah praktik penting dalam komunikasi politik, yakni negosiasi. Komunikasi dalam bentuk negosiasi salah satu fungsinya adalah memberikan informasi tentang fakta yang berhubungan dengan obyek konflik, informasi, nilai, tujuan, kepentingan, keyakinan serta emosi dari para pihak yang bersengketa (Wahid, 1991:215).

Kompromitas Muhammad dalam Perjanjian Hudaibiyah sangat ditunjukkan. Sikap – sikap diatas

mendorong proses pencapaian kesepakatan dalam bernegosiasi. Sebagaimana yang dijelaskan Agus Wahid, bahwa sebenarnya kompromitas atau kelonggaran sikap seperti yang dilakukan Muhammad adalah salah satu teknik negosiasi yang bersifat persuasive (Wahid, 1991:57). Seseorang yang telah melakukan praktik negosiasi maka haruslah ada sebuah kecocokan makna yang kita maksud dengan makna yang dimiliki orang lain. Saat terlibat dalam suatu komunikasi, maka kita akan mengambil bagian dalam proses negosiasi, melalui pencocokan makna yang kita punya dengan orang lain. Proses negosiasi dilakukan dalam rangka memahami, menanggulangi dan beradaptasi terhadap tuntutan dan kesempatan (Ruben, 2013:92-93). Praktik negosiasi ini diwujudkan Muhammad pada tahun 628 Masehi (Syalabi, 1992:163) :

Perundingan itu kemudian dinamakan “*Shulh al Hudaibiyah*” atau Persepakatan Hudaibiyah. Pokok – pokok kesepakatan antara lain : Pertama, peletakan senjata antara kedua belah pihak selama sepuluh tahun; kedua, orang Quraisy muslim yang datang kepada kaum muslimin dengan tidak seizin walinya hendaklah ditolak oleh kaum muslimin; ketiga, Quraisy tidak menolak orang muslim yang kembali pada mereka; keempat, barangsiapa yang hendak memperbuat perjanjian dengan Muhammad dibolehkan dan

sebaliknya; kelima, kaum muslimin tidak jadi mengerjakan umrah tahun ini, ditunda tahun depan. Kaum muslimin memasuki kota Makkah tidak diperbolehkan membawa senjata dan tidak boleh tinggal di Makkah lebih dari tiga hari tiga malam.

Perundingan ini menjadi sebuah pengakuan bahwa Quraisy Makkah menilai bahwa kaum muslimin tidaklah lagi pengacau namun sebagai golongan yang sama. Adanya perjanjian ini juga menjadi kesempatan berpikir karena ada peletakan senjata, inilah celah agar dakwah Islam lebih tersiar. Serta hikmah – hikmah lain yang dapat diambil orang muslimin dari adanya Perjanjian Hudaibiyah (Syalabi, 1992:164-167). Untuk mencapai suatu kata sepakat, demi kemaslahatan bersama, perjanjian/ negosiasi ini menjadi salah satu strategi Muhammad dalam berpolitik. Ini menunjukkan, sebagai kepala negara Muhammad telah melakukan praktik komunikasi politik yang kekinian disebut sebagai negosiasi. Maka, lagi – lagi saat itu, Muhammad bahkan telah mempraktikkan praktik negosiasi jauh sebelum adanya praktik ini dalam ilmu komunikasi politik.

Namun, strategi komunikasi Muhammad memiliki perbedaan yang signifikan. Jika teori model interaktif ini menyebutkan bahwa upaya komunikasi

adalah proses yang sangat dipengaruhi dengan lingkungan berupa berbagai macam faktor diatas, Muhammad justru bisa mengendalikan tatanan sosial masyarakat. Muhammad merombak tatanan sosial, budaya hingga aturan kenegaraan/ politik dalam memimpin Madinah sebagaimana terwujud dalam sebuah budaya bersama sebagai ikatan/ ukhuwah dan konsensus/ naskah politik konstitusi Piagam Madinah. Maka, tentunya Muhammad memiliki strategi komunikasi politik yang jauh melampaui teori kekinian yang ada. Negosiasi ini juga merupakan langkah Muhammad untuk menuju target berupa kesetaraan Madinah (dibawah pimpinan Muhammad) dengan negara di luar Madinah.

Dari hal ini dapat diketahui bahwa Muhammad kemampuan politik berupa negosiasi telah dikuasai jauh sebelum adanya teori mengenai praktik politik negosiasi dalam keilmuan modern. Muhammad menguasai dan mempraktikkannya bahkan jauh sebelum adanya teori negosiasi dalam komunikasi politik. Bukan lagi dalam hubungan antar individu, namun lintas agama dan budaya (kaum kafir Quraisy). Ini artinya, Muhammad menggunakan berbagai macam strategi komunikasi dalam mencapai target komunikasi politiknya.

**e. Retorika dan Media Politik
Muhammad dalam
Komunikasi Politik**

Retorika berasal dari Bahasa Inggris yakni *Rhetoric* dan bersumber dari Bahasa Latin, yakni *Rhetorica* yang artinya ilmu bicara (Rajiyem, 2017:142). Tidak ada yang memungkiri bahwa retorika adalah salah satu kunci keberhasilan seorang komunikator. Baik dalam urusan sosial kemasyarakatan, perdagangan hingga politik. Perkembangan retorika dimulai dari pengembaraan kaum sofis di Yunani sebagai seni berbicara hingga pada *public speaking* yang seringkali kita dengar saat ini. Dimana dalam *public speaking* lebih ditekankan kepada efektivitas pesan agar dapat diterima oleh audiens (Rajiyem, 2017:153).

Retorika juga didefinisikan sebagai *The art of constructing arguments and speechmaking* (seni membangun argumentasi dan seni berbicara). Dalam perkembangannya, retorika juga mencakup proses untuk menyesuaikan ide dengan orang lain melalui berbagai macam pesan. Hal yang jadi perhatian utama dari tradisi retorika terdapat pada lima ajaran/kanon yaitu penciptaan (*invention*), pengaturan (*arrangement*), gaya (*style*), penyampaian (*delivery*), dan ingatan

(*memory*). Lebih lanjut, perhatian retorika jauh berkembang hingga kepada hubungan antar manusia, simbol dan konteks yang terlibat (Morissan, 2014:62-63). Retorika juga disebut juga sebagai ilmu pengetahuan yang mengajarkan kemampuan untuk berpidato (Liliweri, 2010:69).

Titik tolak retorika adalah berbicara. Retorika juga berarti kesenian untuk berbicara. Dewasa ini, retorika diartikan sebagai kesenian yang dipergunakan dalam proses komunikasi antarmanusia. Retorika juga erat dikaitkan dengan kesenian berbicara/berpidato secara baik, cara yang singkat, jelas dengan menggunakan pengungkapan yang tepat namun efektif (Hendrikus, 1991:14). Dapat disimpulkan, retorika politik berarti sebuah seni berbicara atau kemampuan membangun argumentasi yang kemudian diwujudkan dalam sebuah penyampaian informasi untuk mencapai tujuan – tujuan politik. Sebagai kepala negara Madinah, Muhammad tentunya memiliki tujuan politik sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Tujuan politik Muhammad tidak akan jauh dari tujuan dakwah Islam, yakni terwujudnya masyarakat yang humanis dan ber peradaban.

Dalam rangka mencapai tujuan itu, Muhammad menggunakan retorika

sebagai media politik. Dimana, materi-materi retorika yang disampaikan Muhammad juga memiliki efek komunikasi yang signifikan. Sebab, dilihat dari ide, argumentasi dan isi pesan mencerminkan tujuan politik Muhammad yang mengandung perdamaian. Pesan ini tercermin dari khutbah, ceramah, pidato hingga seluruh pesan Muhammad bagi umat Islam maupun warga Madinah. Muhammad memiliki kecakapan berbicara dalam setiap situasi. Muhammad senantiasa memiliki tutur kata tanpa adanya ujaran kebencian dan permusuhan. Kendati dalam sebuah situasi perang sekalipun, Muhammad tetap menjaga tutur katanya dan menjaga etikanya dalam berkomunikasi.

Hal tersebut salah satunya tercermin dalam peristiwa besar kejayaan muslim atas kafir Quraisy di Makkah. Kendati dalam suasana peperangan, tak lupa Muhammad tetap memerintahkan pasukan muslim untuk tidak menyakiti wanita, anak – anak, orang tua lemah serta siapapun yang telah menyerah atas pasukan muslimin pada peristiwa Fathul Makkah. Peristiwa penaklukan kota Makkah oleh kaum muslimin pada 8 Hijriah atau 629 Masehi merupakan salah satu strategi politik Muhammad. Dampak positif dari Perjanjian Hudaibiyah

menjadikan salah satu sebab penaklukan Makkah berjalan lebih mudah (Syalabi, 1992:169).

Kala itu, Muhammad mengerahkan 10 ribu orang untuk memasuki Makkah dan menaklukan Makkah. Itu berawal dari kaum Quraisy yang melanggar/ berkhianat dengan perjanjian Hudaibiyah. Itu ditunjukkan dengan adanya peperangan Bani Bakr dan Khuza'ah. Bani Bakr adalah sekutu kaum kafir Quraisy, sementara Bani Khuza'ah ini sekutu kaum muslimin. Kendati dalam rangka perang dan ekspansi kekuasaan wilayah ke Makkah, Muhammad mengharuskan pasukan muslimin untuk memiliki etika komunikasi yang baik. Misalnya, larangan membunuh anak – anak, orang tua dan wanita – wanita yang lemah. Orang – orang yang menyerah dan masuk ke dalam masjid maupun rumah Abu Sofyan juga dijanjikan keselamatan.

Kepiawaian Muhammad sebagai seorang orator dan pemimpin politik bahkan diakui oleh para cendekiawan Barat. Salah satunya oleh *Jeamme Prou*, seorang orientalis besar yang pernah membuat karya tulis berjudul *Muhammad, Napolion Dari Langit*. Muhammad diakuinya memiliki berbagai keutamaan, salah satunya

dalam berorasi atau melakukan seni berbicara.

Muhammad adalah seorang nabi, pembuat undang – undang, politikus, raja besar, orator, pembicara yang menarik, panglima besar yang ulung. Meskipun ia tidak pernah memasuki salah satu sekolah tinggi Romawi, dan tidak pernah pula memasuki sekolah Parsi, namun namanya sudah tersebar luas dan mulia dengan Rabnya. Cukup menyebutkan namanya saja sudah cukup dikenal, sungguh Muhammad adalah Napolion dari Langit (Khalil Yasien, 1989:128).

Sementara itu, sebagaimana pengertian media politik yang berarti alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator politik untuk menyampaikan pesan politiknya (Cangara, 2011:30). Maka, Muhammad menggunakan sebuah alat atau sarana politis yang cukup efektif saat itu, yakni menggunakan pesan politik yang disampaikan. Selain retorika yang menawan sebagai media, Muhammad juga menggunakan komunikasi tertulis, yakni surat. Saat itu, surat merupakan media politik Muhammad dalam menyiarkan pesan – pesan dakwah yang juga bermuatan politis. Baik mengenai Kerasulan Muhammad dan nilai-nilai Islam.

Muhammad mencontohkan sebuah langkah politis yang berani dan nyata dari seorang pemimpin agama

sekaligus pemimpin negara. Muhammad juga mengajak masuk Islam kepada para pemimpin-pemimpin dunia melalui sebuah surat yang beliau kirimkan (Fu'adi, 2011:16). Muhammad menilai, komunikasi politik dalam bentuk tulisan kepada para pemimpin - pemimpin dunia yang dilakukan secara tidak langsung (melalui surat) adalah langkah komunikasi terbaik dalam situasi saat itu. Surat dinilai sebagai salah satu upaya diplomatis sekaligus dakwah pada para pemimpin dunia. Apalagi, surat adalah salah satu media komunikasi yang memiliki respon yang menuntut penerima berpikir lebih matang dalam memaknai isi pesan yang disampaikan.

Kendati tidak semua tujuan politik dari surat yang dikirimkan pada para pemimpin dunia berhasil, keberhasilan Muhammad diakui. Keberhasilan strategi politik internasional (luar Madinah) hal itu ditunjukkan dengan banyaknya delegasi yang datang ke Madinah pada 9 Hijriah. Bahkan tahun tersebut disebut dengan Tahun Delegasi atau Amul Wufud. Tahun ini disebut juga Amul Wufud datangnya berbagai delegasi bangsa Arab dari segala penjuru menghadap Muhammad. Delegasi yang datang mengutip pidato dan syair dari ahli-ahli

pidato delegasi dari Bani tamim, Bani 'Amir, Bani Abdul Qais, Bani Hanifah, Bani Hamdan dsb (Syalabi, 1992:216). Dalam masa sepuluh tahun pemerintahan Muhammad sebagai kepala negara Madinah, sudah membuat para delegasi (utusan) segenap penjuru datang duduk dengan disambut keramahan dan kemuliaan Madinah dibawah pimpinan Muhammad.

SIMPULAN

Sebagai kepala negara, Muhammad memiliki berbagai strategi dalam proses komunikasi politik. Melampaui teori kekinian tentang komunikasi politik, Muhammad mampu membaca, memahami dan mengendalikan situasi selaku pemimpin Madinah kala itu. Muhammad pun dengan segala strateginya memperhatikan setiap unsur dan prinsip dalam komunikasi politik. Diantaranya adalah unsur komunikator, pesan, media, sasaran/ target dan efek komunikasi politik. Kesimpulan yang dapat diambil antara lain :

1. Dalam dimensi komunikasi, komunikator semestinya memiliki kredibilitas (*source credibility*) dan daya tarik (*source attractiveness*). Muhammad memilikinya untuk mencapai

efektivitas proses komunikasi politik.

2. Pembuatan budaya bersama sebagai pesan persatuan dan perdamaian menjadi ciri khas kebijaksanaan politik Muhammad. Ini berarti, Muhammad memiliki pesan-pesan politik yang dicerminkan dalam setiap kebijakan politiknya dalam proses komunikasi politik di Madinah.
3. Target politik Muhammad adalah persatuan dalam kemajemukan Madinah dibawah kepemimpinannya. Untuk mewujudkannya, begitu banyak strategi yang diterapkan Muhammad. Salah satu hal yang penting digarisbawahi berkenaan dengan target persatuan dalam kemajemukan adalah penghapusan budaya diskriminasi dan rasisme. Begitu pula pembentukan konstitusi yakni Piagam Madinah, yang tidak lain bertujuan mempersatukan Madinah. Piagam Madinah juga merupakan dokumen penting sekaligus bukti autentik keberhasilan kepemimpinan Muhammad dalam sejarah politik Islam.
4. Muhammad menggunakan berbagai macam media politik

untuk melancarkan proses komunikasi politiknya. Berbagai sarana dan media pun dilakukan. Mulai dari retorika, orasi bahkan hingga surat yang dapat disebut sebagai media yang melancarkan politik hubungan antar negara, bilateral, bahkan internasional. Media politik ini tentu disempurnakan dengan metode penyampaian dengan etika yang baik dan luhur serta disukai banyak kalangan. Salah satu contoh adalah melindungi kaum lemah, kendati dalam situasi genting/ darurat sekalipun.

5. Strategi komunikasi Muhammad memiliki perbedaan yang signifikan. Teori Model Interaktif diidentikkan dengan proses negosiasi menyebutkan bahwa upaya komunikasi adalah proses yang sangat dipengaruhi dengan lingkungan (sosial-budaya). Namun, seluruh strategi komunikasi yang dilakukan Muhammad dalam komunikasi politik justru bisa mengendalikan tatanan sosial masyarakat. Muhammad merombak tatanan sosial, budaya hingga aturan kenegaraan/ politik dalam memimpin Madinah. Artinya, Muhammad sebagai pemimpin

Madinah kala itu, memiliki strategi komunikasi yang jauh melampaui teori kekinian yang ada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zainal Abidin, 1973. *Piagam Nabi Muhammad Saw, Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama Di Dunia*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Arifin, Anwar, 2015. *Perspektif Ilmu Politik*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Brent D. Ruben, Lea P. Stewart, 2013. *Komunikasi dan Perilaku Manusia*, Jakarta : Rajawali.
- Cangara, Hafied, 2011. *Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi*, Jakarta : Rajawali.
- Esposito, John L., 2001. *Dunia Islam Modern : Ensiklopedi Oxford*, Bandung: Mizan.
- Fu'adi, Imam, 2011. *Sejarah Peradaban Islam*, Yogyakarta : Teras.
- Gulen, M. Fethullah, 2002. *Versi Terdalam; Kehidupan Rasul Allah Muhammad SAW*, Raja Grafindo Persada.
- Hart, Michael H., Diterjemahkan oleh H. Mahbub Djunaidi, 1988. *Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah (The 100, a Ranking of the Most Influential Persons in History)*, Pustaka Jaya: Jakarta.
- Hasan, Abdillah F., 2012. *17 Rahasia Nabi Muhammad*, Jakarta : Gramedia.
- Hendrikus, Dori Wuwur, 1991. *Retorika: Terampil Berpidato, Berdiskusi, Berargumentasi, Bernegosiasi*, Yogyakarta : Kanisius.
- Heryanto, Gun Gun Shulhan Rumar, 2013. *Komunikasi Politik : Sebuah Pengantar*, Bogor: Ghalia Indonesia.

- Ibn Taymiyyah, Taqiyuddin, 1997. *Kebijaksanaan Politik Nabi SAW*, Surabaya: Dunia Ilmu.
- Khalil Yasien, As Syaikh, 1989. *Muhammad Dimata Cendekiawan Barat*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Khan, Abdul Wahid, 2002. *Rasulullah di Mata Sarjana Barat*, Mitra Pustaka.
- Liliweri, Alo, 2010. *Strategi Komunikasi Masyarakat*, Yogyakarta : Lkis.
- Morissan, 2014. *Teori Komunikasi : Individu Hingga Massa*, Jakarta : Morison Kencana.
- Mulyana, Deddy, 2005. *Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy, 2014. *Komunikasi Antarbudaya, Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya, Bagian II: Suatu Pendekatan Terhadap Komunikasi Antarbudaya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Murodi, 2013. *Dakwah Islam dan Tantangan Masyarakat Quraisy : Kajian Sejarah Dakwah pada Masa Rasulullah SAW*, Jakarta : Kencana.
- Priandono, Tito Edy, 2016. *Komunikasi Keberagaman*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Rahman, Afzalur, 2002. *Nabi Muhammad Sebagai Pemimpin Militer*, Jakarta : Amzah.
- Shoelhi, Mohammad, 2009. *Komunikasi Internasional: Perspektif Jurnalistik*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Soyomukti, Nurani, 2013. *Komunikasi Politik : Kudeta Politik Media, Analisa Komunikasi Rakyat dan Penguasa Malang* : Intrans Publishing.
- Subiakto dkk, Henry, 2012, *Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi*, Jakarta : Kencana.
- Sulaiman, Rusydi, 2014. *Pengantar Metodologi Studi Sejarah Peradaban Islam*, Rajawali: Jakarta.
- Syalabi, A. 1992. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka Al Husna.
- Wahid, Agus, 1991. *Perjanjian Hudaibiyah : Telaah Diplomasi Muhammad SAW*, Jakarta : Grafikatama Jaya.
- Zuhri, M.,2004. *Potret Keteladanan Kiprah Politik Muhammad Rasulullah*, Lesfi : Yogyakarta.

Sumber Internet :

journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/download/1413/1367 oleh S Sutriani - 2016 (diakses pada Agustus 2017).

<https://journal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/viewFile/839/686>, Rajiyem, Staf Pengajar Ilmu Komunikasi Fisipol UGM, Jurnal Humaniora, *Sejarah dan Perkembangan Retorika*, didownload pada 26 Mei 2017, hlm 142, pukul 16.25 WIB.